

DI PENGHUJUNG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025: BAGAIMANA CAPAIAN RB INDONESIA?

Reformasi birokrasi adalah salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Reformasi birokrasi sendiri dapat dipahami sebagai proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik yaitu menjadi birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif (Kementerian ESDM, 2019). Reformasi birokrasi pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk perubahan-perubahan yang berarti dalam suatu sistem birokrasi pemerintah (Riyadi, 2008). Reformasi birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004 (Perpres No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025).

Lalu, pada tahun 2010 ditetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 melalui dengan Perpres No. 81 tahun 2010. Grand Design tersebut disusun sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Di dalamnya dinyatakan bahwa pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Dokumen tersebut juga menyertakan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi dimana dilihat melalui pencapaian sasaran dengan beberapa indikator utama, yaitu Indeks Persepsi Korupsi, OPINI WTP, Integritas Pelayanan Publik, Peringkat Kemudahan Berusaha, Indeks Efektivitas Pemerintahan, serta Instansi Pemerintah yang Akuntabel. Indikator-indikator tersebut diharapkan terus membaik setiap tahunnya sehingga pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas.

Tahun ini, kita sedang berada di tahun 2024 yang bisa dikatakan mendekati penghujung grand design RB tersebut. Lalu sejauh mana visi RB tersebut sudah terwujudkan? Mari kita bahas pada bagian berikut.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diartikan sebagai indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, yang dengan itu memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara. Skala yang digunakan adalah dari 0 sampai 100, dimana skor "0" diartikan sebagai tingkat korupsi yang terjadi sangat tinggi dan sebaliknya, skor "100" menunjukkan Negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang rendah atau dengan kata lain bersih dari korupsi (Muhammad Fajar, Zul Azhar, 2018).

Jika dicermati, berdasarkan data yang dikeluarkan organisasi Transparency International (TI) di tahun 2023 skor IPK Indonesia berada di angka 34, angka yang sangat jauh dari nilai maksimal yaitu 100. Bahkan menurut TI IPK Indonesia mengalami kecenderungan turun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 skor IPK Indonesia adalah 40, kemudian turun menjadi 37 pada tahun 2020, lalu sempat sedikit menjadi 38 pada tahun 2021, namun kembali turun drastis menjadi 34 pada tahun 2022 lalu. Lalu, tahun 2023 IPK

Indonesia stagnan berada di skor 34 dan secara peringkat Indonesia turun dari peringkat 110 menjadi peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei (<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>). Ini menjadi catatan penting, karena bisa dikatakan bahwa proses reformasi birokrasi sejauh ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Isu ini menjadi isu yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan.

Tingkat Perolehan Opini WTP

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan instansi pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>). Grand design RB menargetkan peningkatan secara berkelanjutan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan nilai WTP baik di tingkat instansi pusat maupun di kelompok instansi daerah.

Secara target, pada tahun 2024 target persentase Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP dari BPK ditargetkan 95%. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, masing-masing ditargetkan persentasenya adalah 95%. Sementara itu, di lingkup pemerintah Kabupaten ditargetkan pada tahun 2024 persentase yang mendapatkan opini WTP adalah 85% (RPJMN 2020 – 2024).

Untuk realisasinya sejauh ini, jika dicermati dari laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Opini WTP dari BPK
Sumber: diolah dari laporan BPK 2018-2022

Jika diperhatikan pada Gambar 1, tren persentase instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dari BPK fluktuatif dalam kurun waktu 2018-2022, namun di tingkat instansi pusat cukup stabil diatas angka 90 persen. Bahkan di tahun 2022 sudah mencapai 99% artinya sudah melewati target untuk tahun 2024, hanya saja ini perlu dipertahankan. Sementara itu, di tingkat instansi daerah mengalami kenaikan dari tahun 2019, meskipun tahun 2022 mengalami penurunan sedikit. Untuk instansi daerah, memang masih perlu upaya lebih keras untuk meningkatkan persentase instansi daerah yang memperoleh WTP. Ini menjadi prioritas bagi para pihak yang berperan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Integritas Pelayanan Publik

Indikator ini untuk menilai ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Di dalam grand design RB salah satu indikator yang dirujuk adalah indeks survei integritas dalam pelayanan publik. Indeks ini merujuk pada Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan oleh KPK semenjak tahun 2007 yang mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik pemerintahan.

Namun semenjak tahun 2016, KPK memperluas ruang lingkup survei tersebut tidak hanya dalam pelayanan publik tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dan survei tersebut diberi nama survei penilaian integritas (SPI). Jika kita cek di website <https://jaga.id> milik KPK, nilai terakhir dari SPI secara nasional tahun 2023 adalah 70.97. Nilai ini turun dari tahun sebelumnya yaitu 71,94 (pada <https://jaga.id> tercatat 78,86, tetapi dikoreksi oleh LAKIP KemenpanRB tahun 2022, disana tercatat 71,94). Sementara itu jika dilihat di tingkat K/L tahun 2023 nilainya 75.30 menurun dari tahun 2022 di angka 78.9. Namun di tingkat daerah tahun 2023 nilai SPI-nya 70.27, naik sedikit dari tahun sebelumnya di angka 70.8. Meskipun demikian nilai-nilai tersebut dalam pengkategorian SPI masih masuk dalam kategori “waspada”. Karena nilai yang dianggap aman atau diistilahkan dengan “terjaga” adalah di angka 77,5-100.

Agar lebih spesifik menunjukkan kualitas pelayanan publik, kita bisa merujuk hasil indeks kepatuhan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI. Survei tersebut menilai keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Nilai kepatuhan tersebut dikategorikan menjadi zona hijau, zona kuning, hingga zona merah, dimana zona merah adalah nilai terendah/kualitas pelayanan buruk. Berdasarkan penilaian yang dikeluarkan oleh Ombudsman pada tahun 2023 terdapat 39 instansi pemerintah (6.64%) yang termasuk kategori “zona merah”. Jumlah ini sudah mengalami penurunan dari tahun 2022, dimana terdapat 64 instansi pemerintah yang berada di zona merah (10.92%). Bahkan pada tahun 2021, terdapat 92 instansi pemerintah (15%) yang termasuk kategori “zona merah” (Ombudsman, 2021, 2022, 2023). Artinya terjadi perbaikan yang cukup signifikan, namun jumlah 92 instansi bukan jumlah yang sedikit sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama ke depan untuk diakselerasi perbaikannya agar tujuan reformasi birokrasi terwujud.

Tingkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*)

Indeks EODB adalah skor kemudahan berusaha yang mencerminkan kesenjangan antara kinerja suatu perekonomian dan ukuran praktik terbaik di seluruh sampel yang terdiri dari 41 indikator untuk 10 topik Doing Business (indikator peraturan pasar tenaga kerja tidak termasuk). Skor kemudahan berbisnis suatu perekonomian tercermin dalam skala 0 hingga 100, dengan 0 mewakili terendah dan 100 mewakili kinerja terbaik (<https://archive.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>).

Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2019 Bank Dunia menilai EODB di Indonesia di skor 68.2. Lalu pada tahun 2020 indeks tersebut naik menjadi 69,6. Artinya terjadi sedikit kenaikan. Sementara itu dari segi peringkat, Indonesia di tahun 2017 berada di peringkat 91, lalu sempat naik pada tahun 2018 menjadi 72 kemudian turun menjadi peringkat 73 di tahun 2019 dan stagnan di peringkat 73 di tahun 2020. Namun sejak September 2021 Bank Dunia menghentikan pembuatan laporan indeks kemudahan berbisnis, dan sampai saat ini belum ada pembaruan data.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) merekomendasikan Global Competitiveness Index (GCI) sebagai salah satu pengganti EODB pada tahun 2021. Lalu, jika kita lihat data IMD Global Competitiveness Index, terakhir pada tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat ke-34 dengan skor 70.75 (dari skala 100). Sementara itu, jika kita cermati dalam lima tahun terakhir, peringkat GCI Indonesia fluktuatif. Pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 32, lalu pada tahun 2020 turun menjadi peringkat 40, lalu pada tahun 2021 naik lagi sedikit ke posisi 37, namun pada tahun 2022 turun drastis ke posisi 44 (<https://www.indonesia-investments.com>). Di tahun 2023, peringkat Indonesia adalah 34 dengan skor 70.75 (dari skala 100). Artinya selama 5 tahun terakhir Indeks Daya Saing Global kita fluktuatif padahal harapannya selalu mengalami peningkatan. Bahkan kita belum berhasil kembali mencapai peringkat 32 sebagaimana peringkat pada tahun 2019.

Indeks Efektivitas Pemerintahan

Indeks efektivitas pemerintah menilai kinerja dan efektivitas pemerintahan negara dunia. Indeks ini mengukur parameter efektivitas, di antaranya kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah. Indeks ini dikeluarkan oleh Bank Dunia dalam bentuk Worldwide Governance Indicators (WGI)

Terkait indeks efektivitas pemerintahan, skor terakhir Indonesia yaitu pada tahun 2022 berada pada 66.04. Secara posisi, Bank Dunia dalam menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara. Skor Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yaitu 64.76. Lalu jika perhatikan selama 5 tahun terakhir peringkat Indonesia mengalami kenaikan meskipun tipis. Hal ini perlu untuk ke depan di pertahankan, bahkan kalau bisa lebih diakselerasi peningkatannya. Karena jika dibandingkan dengan skala maksimalnya yaitu di angka 100, maka masih cukup besar gapnya.

Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat dari penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB setiap tahunnya. Instansi pemerintah dianggap akuntabel ketika mendapatkan nilai SAKIP minimal "baik" (B). Persentase instansi pemerintah yang nilai SAKIP-nya "Baik" diharapkan meningkat dari tahun ke tahunnya hingga tahun 2025.

Merujuk pada data terakhir yang dimuat Kementerian PANRB dalam LAKIP yang dipublikasikan di websitenya, pada tahun 2022 persentase instansi pemerintah di tingkat K/L yang mendapatkan nilai SAKIP B keatas adalah 95,06%. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 89,53%. Sementara itu di tingkat pemerintah provinsi capaiannya 100%, artinya sudah maksimal. Untuk tingkat pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022 capaiannya 72,05%, naik dari tahun 2021 yaitu 65,75%. Jika kita bandingkan dengan target dalam RPJMN 2020-2024, pada tahun 2024 di targetkan persentase instansi pemerintah yang nilai SAKIP \geq B adalah 100 persen di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, sementara itu di tingkat Kabupaten Kota ditargetkan 80%. Artinya di tingkat K/L dan Provinsi capaian tersebut sudah baik, hanya tinggal di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang perlu ditingkatkan dari 72,05% menjadi 80% di tahun 2024.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa beberapa indikator sudah menunjukkan progres yang cukup baik seperti akuntabilitas instansi pemerintah dari segi persentase instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP, maupun dari sisi yang nilai SAKIP-nya baik. Namun untuk beberapa indikator, sangat urgen untuk diakselerasi capaiannya seperti IPK, Indeks Kemudahan Berusaha, Kualitas Pelayanan Publik, dan Indeks Efektivitas Pemerintahan. Hal ini juga sepertinya bisa menjadi perhatian bagi pemerintahan selanjutnya untuk meningkatkan lagi capaian reformasi birokrasi. Seyogyanya progresnya terus maju, jangan sampai mundur lagi ke belakang. Masrully (Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Puslatbang PKASN LAN)

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Muhammad & Zul Azhar. 2018. Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara. *Jurnal Ecogen*, 1 (3) 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 2019. *Buku saku Reformasi Birokrasi*.
- Ombudsman RI. 2022. Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Ombudsman RI. 2023. Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.
- Kaufmann, Daniel and Aart Kraay. 2023. *Worldwide Governance Indicators, 2023 Update* (www.govindicators.org), Accessed on 10/05/2024.
- Riyadi, 2018. Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Perilaku Administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(1), 07.
- Ease of Doing Business Scores. <https://archive.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>
- Nuralam, Candra Yuri. 2024. *KPK Merasa Dicambuk Karena Peringkat IPK Indonesia Turun*.<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/647829/kpk-merasa-dicambuk-karena-peringkat-ipk-indonesia-turun>
- Ragam Opini BPK. 2020. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>